

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih ditemukannya permasalahan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Kubu tahun 2025, terutama terkait keterbukaan informasi pada tahapan perencanaan, penetapan penerima, penyaluran, dan evaluasi, serta berbagai kendala dan upaya pemerintah gampong dalam mewujudkan transparansi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan aparatur gampong (Geuchik, Sekdes, Kaur Keuangan, Tuha Peut), perwakilan DPMG, tokoh masyarakat, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap berita acara musyawarah, SK Keuchik tentang KPM BLT, daftar penerima, serta laporan penyaluran dan evaluasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan BLT Dana Desa di Gampong Kubu telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang tercermin dari pelaksanaan Musdesus, pelibatan Tuha Peut dan tokoh masyarakat, verifikasi dan validasi data KPM berdasarkan kriteria keluarga miskin ekstrem, lansia, disabilitas, serta pengumuman daftar penerima dan laporan penyaluran di meunasah dan papan informasi gampong. Penyaluran BLT sebesar Rp 300.000 per bulan per keluarga dilakukan secara terbuka dengan pencocokan nama penerima, penandatanganan daftar hadir dan kwitansi, serta pendampingan DPMG, sedangkan evaluasi triwulanan dilaksanakan melalui musyawarah untuk meninjau kelayakan penerima, menindaklanjuti pengaduan, dan memperbarui data sesuai perubahan kondisi ekonomi warga. Namun, penelitian ini juga menemukan kendala berupa keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak semua warga yang memenuhi kriteria dapat menerima BLT, dinamika perubahan kondisi sosial ekonomi yang belum sepenuhnya tertangkap dalam data, serta perlunya penguatan mekanisme pengaduan dan sosialisasi jadwal penyaluran. Oleh karena itu, penguatan validasi data, pembaruan daftar KPM, dan penataan kanal pengaduan yang lebih sistematis menjadi penting untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran BLT Dana Desa di masa mendatang.

Kata kunci: Transparansi, Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai, Pengelolaan, Gampong Kubu

ABSTRACT

This research is motivated by the persisting issues of transparency in the management of Village Funds in the Direct Cash Assistance (BLT) program in Gampong Kubu in 2025, particularly related to the openness of information in the stages of planning, beneficiary determination, distribution, and evaluation, as well as various challenges and efforts of the village government in realizing such transparency. The study employs a descriptive qualitative method with informants consisting of village apparatus (Geuchik, village secretary, financial affairs officer, Tuha Peut), representatives of the Village Community and Village Empowerment Agency (DPMG), community leaders, and Beneficiary Families (KPM), using data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation of meeting minutes, village head decrees on BLT beneficiaries, recipient lists, and distribution and evaluation reports. The findings indicate that, in general, the management of BLT Village Funds in Gampong Kubu has applied the principles of transparency and accountability in accordance with Ministry of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, as reflected in the implementation of special village meetings (Musdesus), the involvement of Tuha Peut and community leaders, verification and validation of beneficiary data based on criteria for extreme poor households, the elderly, and persons with disabilities, as well as public announcements of beneficiary lists and distribution reports at the meunasah and village information boards. The distribution of BLT amounting to IDR 300,000 per month per family is carried out openly through name checking, signing of attendance lists and receipts, and supervision from DPMG, while quarterly evaluations are conducted through village meetings to review beneficiary eligibility, follow up on complaints, and update data according to changes in residents' economic conditions. However, the study also identifies several obstacles, including limited budget which prevents all eligible residents from receiving BLT, dynamic socio-economic changes that are not fully captured in the data, and the need to strengthen complaint mechanisms and the dissemination of distribution schedules. Therefore, strengthening data validation, updating the KPM list, and organizing more systematic complaint channels are crucial to improve the transparency and targeting accuracy of BLT Village Fund management in the future.

Keywords: *Transparency, Village Fund, Direct Cash Assistance, Management, Kubu Village.*